

ABSTRAK

Kewenangan pemerintah adalah suatu aset pemerintah yang dikuasakan kepada Pemerintah dalam mengatur, mengelola, memanfaatkan serta melakukan tindakan atas aset tersebut yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara”*, didalam Pasal tersebut menjelaskan salah satu dari kewenangan Pemerintah adalah bumi atau tanah. Sering terjadi permasalahan yang timbul karena kasus tanah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan : 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap penggusuran bangunan di atas tanah aset Pemerintah. 2) Mengetahui kendala yang terjadi di lapangan serta solusi dalam menyelesaikannya dari Pemerintah. Dengan menggunakan metode kajian Yuridis Sosiologis, supaya bisa menemukan realita yang ada di lapangan dalam penelitian. Metode ini mencari data dengan cara wawancara dan data yang ditemukan di lapangan, untuk kemudian menganalisa masalah hukum yang terjadi pada kasus tersebut.

Dalam proses penelitian yang dilakukan menemukan hasil berupa : 1) Tidak adanya ganti rugi dari Pemerintah untuk penggusuran bangunan di atas tanah aset Pemerintah. 2) Tidak serta merta Pemerintah melakukan penggusuran. Namun, ada fasilitas yang disiapkan Pemerintah untuk ditawarkan kepada masyarakat yang telah dilakukan penggusuran.

Kata Kunci : Tanah Pemerintah, Penggusuran, Ganti Rugi

ABSTRACT

Government authority is an asset that delegated to the government to rule, manage, utilize assets based on article 33 paragraph (3) UUD 1945 which mentions that "land and water and natural resources inside them are owned by the country". That article explained about one of several government authority in managing land. Currently, there were several cases related to land management in Indonesia.

This research is aim to find out : 1) How the compensation of building eviction from government's land can be implemented. 2) To know the constrain that happened and the solve of the government. Sociological Juridic used as the research method to find the actual condition accurately. Data collection method that used in this research are interview and observation. It is aimed to analyze legal problem of the case.

The result of this research are : 1) There is no compensation for building eviction form government's land. 2) The government gave some facilities as the alternate that offered to the citizen that has been evicted.

Keywords: Government's land, eviction, compensation